

Analisis Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem di Kota Medan

Musafran Harahap

Universitas Medan Area, Medan, Indonesia

Corresponding Author : ✉ msfrn_h@yahoo.com

ABSTRACT

ARTICLE INFO

Article history:

Received

15 August 2023

Revised

25 August 2023

Accepted

15 September 2023

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kemiskinan di wilayah kota Medan dan bagaimana intervensi dan solusi pemerintah dalam penanganannya. Penelitian deskriptif kualitatif dengan metode literatur melalui studi literatur dari jurnal-jurnal dan aplikasi web sepakat Bappenas. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari berbagai survey seperti Bappenas, BPS, Resosek dan P2KE. Hasil penelitian menjelaskan bahwa Kota Medan selalu berupaya untuk mengatasi permasalahan kemiskinan secara maksimal; Faktanya, kemiskinan masih menjadi masalah yang parah. Penanggulangan kemiskinan memerlukan keterpaduan berbagai kebijakan dan program pembangunan di berbagai sektor. Cara terbaik untuk memerangi kemiskinan adalah dengan Menyusun Rencana penanggulangan kemiskinan Daerah (RPKD) serta melakukan intervensi sesuai core problemnya, serta mendorong kebijakan yang memperkuat pesan dan posisi ekonomi. Faktor pendorong kemiskinan di Kota Medan adalah pembangunan yang tidak merata.

Key Word

Penanggulangan, Kemiskinan Ekstrem, Kota Medan

How to cite

<https://pusdikra-publishing.com/index.php/jecs>

Doi

[10.51178/jecs.v5i2.1535](https://doi.org/10.51178/jecs.v5i2.1535)



This work is licensed under a
[Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

PENDAHULUAN

Memasuki dekade kedelapan kemerdekaan, salah satu masalah utama di Indonesia yaitu penduduk miskin. Istilah kemiskinan timbul disaat seseorang ataupun segelintir orang tak bisa memenuhi taraf kesejahteraan ekonomi yang menjadi kebutuhan minimum dari standar kehidupan tertentu seperti makanan, tempat tinggal, pendidikan, pakaian, serta pekerjaan. Ketika sumber daya keuangan dan material tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan fundamental seseorang, seseorang dikatakan berada dalam keadaan miskin. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), orang dianggap miskin jika rata-rata pengeluaran per kapita per bulannya di bawah garis kemiskinan. Karena tingkat kemiskinan yang tinggi dan bertambahnya jumlah keluarga miskin, keadaan kemiskinan terus memburuk. (Todaro dalam Nisa, 2020).

Faktor yang saling berkaitan antara lain natural dan kultural terhadap kemiskinan merupakan salah satu masalah utama pembangunan yang sifatnya kompleks dan multi dimensional, Kemiskinan bukan lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan memenuhi hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam menjalani kehidupan secara bermartabat (Henry dkk, 2022). Secara literal, kemiskinan berdasar dari istilah miskin yang berarti tidak berharta benda.

Badan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (BKPK) yang berkolaborasi dengan Lembaga Penelitian SMERU mendefinisikan kemiskinan, diantaranya yaitu:

- a) Pada dasarnya kemiskinan di definisikan dari segi pendekatan pada bentuk uang yang ditambah dengan keuntungan nonmaterial di diperoleh seseorang. Kemiskinan secara luas berupa kekurangan ataupun kondisi kesehatan yang buruk, kekurangan transportasi, serta tidak memiliki pendidikan yang dibutuhkan oleh penduduk.
- b) Kemiskinan adakalanya di definisikan dari segi kekurangan ataupun tidak memiliki aset-aset, yang berupa rumah, uang, tanah, peralatan, emas, kredit dan sebagainya.
- c) Kemiskinan nonmaterial berupa kebebasan, hak guna mendapatkan pekerjaan yang memadai, hak atas rumah tangga serta kehidupan yang memadai.

Kemiskinan ekstrem didefinisikan sebagai kondisi dimana kesejahteraan masyarakat berada di bawah garis kemiskinan ekstrem - setara dengan USD 1.9 PPP (purchasing power parity). Kemiskinan ekstrem diukur menggunakan "absolute poverty measure" yang konsisten antar negara dan antar waktu. Menggunakan definisi tersebut, pada tahun 2021 tingkat kemiskinan ekstrem di Indonesia adalah 4 persen atau 10,86 juta jiwa. Tingkat kemiskinan ekstrem tersebut lebih rendah bila dibandingkan dengan tingkat kemiskinan nasional yang didasarkan pada data Susenas yang dirilis secara berkala oleh BPS, yang pada Maret 2021 adalah 10,14 persen atau 27,54 juta jiwa. Pada tahun 2021, tingkat kemiskinan ekstrem di Indonesia sebesar 4%. (TNP2K,2021).

Berdasarkan hasil identifikasi Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan, termasuk pengurangan kemiskinan ekstrem, yang tersebar di berbagai kementerian/lembaga dan pemerintah daerah pada tahun anggaran 2021 sudah cukup besar, yang terbagi dalam dua kelompok program, yaitu program/kegiatan dalam rangka mengurangi beban pengeluaran kelompok miskin ekstrem melalui bantuan sosial dan subsidi, dan program pemberdayaan untuk meningkatkan produktivitas dalam rangka

meningkatkan kapasitas ekonominya. Sesuai data dari Kementerian Keuangan, anggaran terkait kemiskinan di tahun anggaran 2021 mencapai Rp.526 triliun. Dengan demikian, isu utama percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem adalah bagaimana memastikan program perlindungan sosial dan pemberdayaan dapat secara efektif mengurangi kemiskinan termasuk kemiskinan ekstrem.

Penghapusan kemiskinan ekstrem telah menjadi fokus Pemerintah sebagai amanat dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals) dan arahan Presiden pada Rapat Terbatas tanggal 4 Maret 2020 menginstruksikan kemiskinan ekstrem diturunkan menjadi 0% pada tahun 2024 (Bappenas, 2020). Tantangan dalam percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem diantaranya:

- Rendahnya akurasi basis data kelompok miskin dan rentan;
- Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) penyelenggara di tingkat daerah
- Belum meratanya kelembagaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) yang kuat di daerah;
- Standar layanan dan prosedur yang belum optimal; serta
- Fragmentasi pelaksanaan program lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem memerlukan upaya multidimensi dan kolaboratif lintas sektor di tingkat pusat dan daerah. Tiga strategi utama yang diusung:

1. Menurunkan beban pengeluaran,
2. Meningkatkan pendapatan.
3. Meminimalkan wilayah kantong kemiskinan.

Intervensi berfokus pada perbaikan akurasi penyaluran dan konvergensi program lintas sektor. Untuk mendorong kolaborasi program dan anggaran dan mencapai kemiskinan ekstrem "0%" pada tahun 2024, telah ditentukan:

1. Tahap 1 tahun 2021 di Lokus 35 kabupaten.
2. Tahap 2 tahun 2022 250 kabupaten/kota prioritas perluasan (termasuk di dalamnya 35 kabupaten prioritas tahun 2021).
3. Tahap 3 tahun 2023-2024 untuk perluasan secara bertahap di 514 kabupaten/kota.

Tujuan Panduan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem adalah untuk memberikan pedoman bagi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah menyusun dan melaksanakan kebijakan kolaboratif, integratif dan spasial dalam mencapai kemiskinan ekstrem "0%" pada tahun 2024. Karena dalam era desentralisasi pemerintah daerah mengelola lebih dari 40% belanja

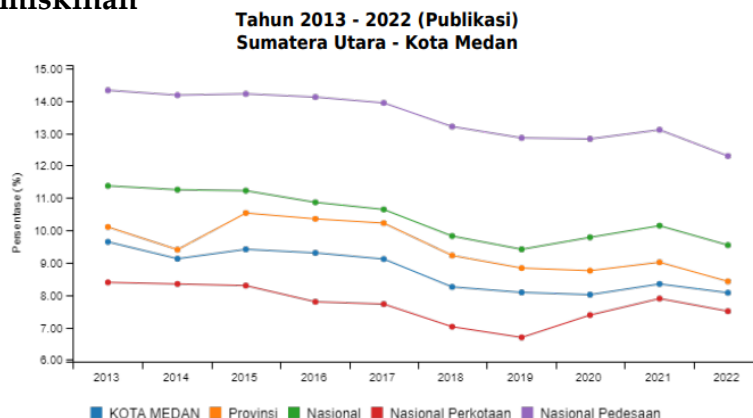
publik dan bertanggung jawab terhadap pelayanan dasar kesehatan, pendidikan dan infrastruktur dasar yang penting untuk pengentasan kemiskinan dan memperbaiki ketimpangan. Indonesia telah berhasil mengurangi angka kemiskinan hingga satu digit, sejak krisis ekonomi 1998/1999 hingga menjadi 9.41% di tahun 2019. Akan tetapi laju penurunan kemiskinan makin melambat. Pemerintah daerah perlu memperkuat kebijakan anti kemiskinannya untuk mempercepat laju penurunan kemiskinan nasional.

METODE PENELITIAN

Studi kajian ini merupakan deskriptif kualitatif dengan metode literatur melalui studi kepustakaan yang bersumber dari jurnal-jurnal hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tingkat kemiskinan, juga melalui akses data-data yang diperoleh dari website sebagai publikasi informasi. Kajian deskriptif kualitatif dapat diartikan bahwa peneliti sebagai instrumen kunci dimana teknik pengumpulan data dilakukan dengan penggabungan dan analisis data secara induktif sehingga menghasilkan data yang bersifat deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

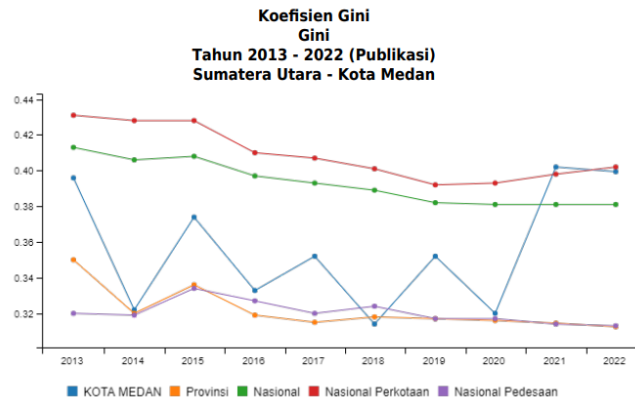
Ukuran Kemiskinan



Sumber : Aplikasi Sepakat Web Bappenas (2023) (2023)

Berdasarkan grafik diatas, tingkat kemiskinan Kota Medan pada tahun 2022 adalah sebesar 8.07%. Nilai ini menunjukkan penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 0.27%. Akan tetapi, hal ini menunjukkan pelambatan penurunan tingkat kemiskinan dibandingkan tahun sebelumnya. Tingkat kemiskinan Kota Medan tahun 2022 dibawah tingkat kemiskinan nasional. Sebagai daerah yang didominasi daerah perkotaan, tingkat kemiskinan Kota Medan masih lebih tinggi dibandingkan tingkat kemiskinan Nasional khusus daerah perkotaan.

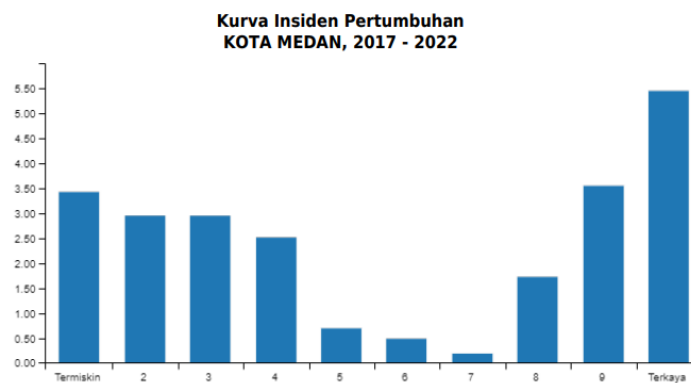
Koefisien Gini



Sumber : Aplikasi Sepakat Web Bappenas (2023)

Koefisien Gini Kota Medan pada tahun 2022 adalah sebesar 0.40. Nilai ini menunjukkan penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 0.00 yang menunjukkan kemajuan dalam penanganan masalah ketimpangan. Akan tetapi, hal ini menunjukkan pelambatan penurunan koefisien Gini dibandingkan tahun sebelumnya. Koefisien Gini Kota Medan tahun 2022 masih lebih tinggi dibandingkan koefisien Gini nasional. Sebagai daerah yang didominasi daerah perkotaan, koefisien Gini Kota Medan sudah lebih rendah dibandingkan koefisien Gini Nasional khusus daerah perkotaan.

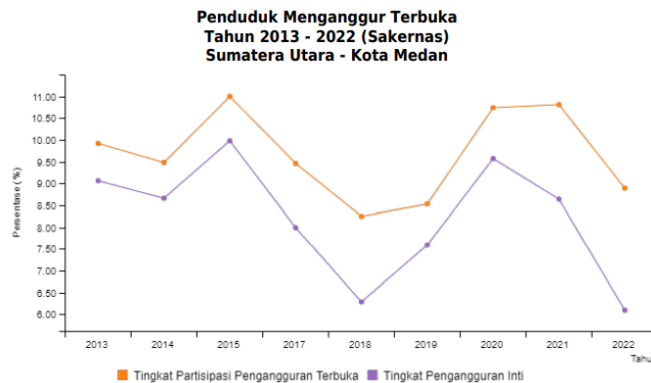
Kurva Insiden Pertumbuhan



Sumber : Aplikasi Sepakat Web Bappenas (2023)

Secara rata-rata, pengeluaran per kapita penduduk Kota Medan dari tahun 2017 ke tahun 2022 tumbuh sebesar 2.3893 %. Akan tetapi, jika ditelusuri lebih dalam 17.2110 % penduduk Kota Medan tumbuh di bawah rata-rata. Pertumbuhan pengeluaran per kapita antara penduduk berpendapatan tinggi dan berpendapatan rendah relatif sangat timpang, di mana penduduk 10% termiskin (desil 1) hanya bertumbuh sebesar 3.4202 %, sementara penduduk 10% (desil 10) terkaya tumbuh hingga 5.4434 %.

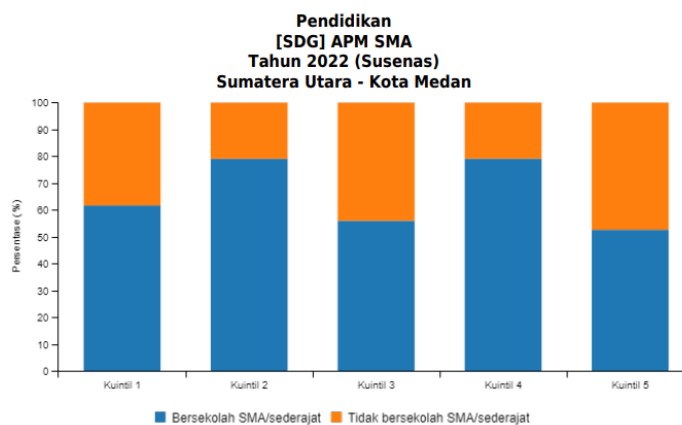
Penduduk Menganggur Terbuka



Sumber : Aplikasi Sepakat Web Bappenas (2023)

Tingkat pengangguran terbuka Kota Medan pada tahun 2022 adalah sebesar 8.89%. Nilai ini menunjukkan penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 1.92%, yang artinya jumlah penganggur terbuka berkurang sejumlah 1,787,442 orang. Lebih dari itu, tingkat penurunan pengangguran terbuka di tahun 2022 lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya.

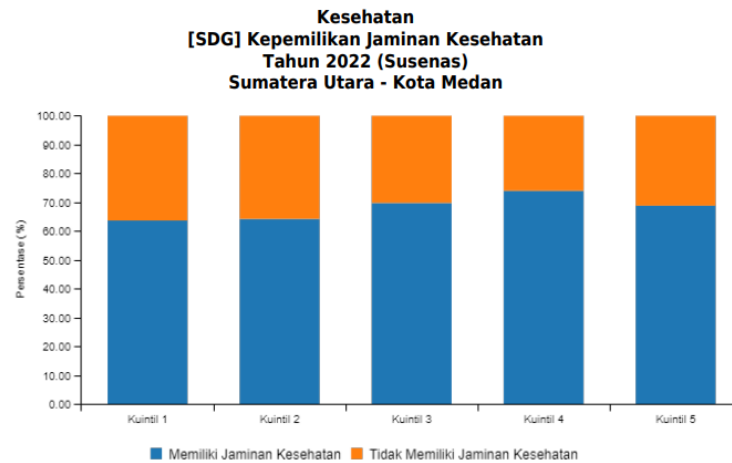
Pendidikan



Sumber : Aplikasi Sepakat Web Bappenas (2023)

Indikator [TPB] APM SMA merupakan indikator dengan capaian paling rendah di antara indikator-indikator Pendidikan, dengan capaian sebesar 65.30%. Padahal, indikator ini memiliki target yang harus dicapai, ditentukan dari peraturan mengenai SPM/SDG. Indikator ini masih 26.30% di bawah target SPM/SDG, sehingga patut menjadi perhatian lebih. Nilai capaian ini terdistribusi secara merata di seluruh kelompok kesejahteraan, sehingga ini bukan semata-mata masalah penduduk miskin.

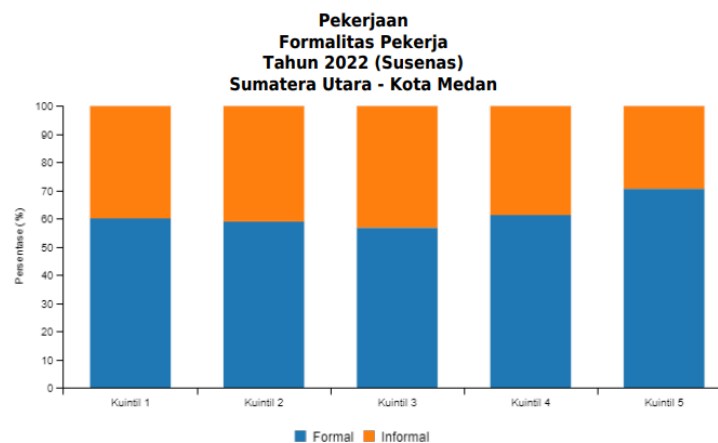
Kesehatan



Sumber : Aplikasi Sepakat Web Bappenas (2023)

Indikator [TPB] Kepemilikan BPJSKes/Jamkesmas merupakan indikator dengan capaian paling rendah di antara indikator-indikator kesehatan, dengan capaian sebesar 68.60%. Padahal, indikator ini memiliki target yang harus dicapai, ditentukan dari peraturan mengenai SPM/SDG. Indikator ini masih 26.40% di bawah target SPM/SDG, sehingga patut menjadi perhatian lebih. Lebih dari itu, indikator ini mengalami masalah ketimpangan di mana penduduk 20% termiskin hanya memiliki capaian 63.72% sementara penduduk 20% terkaya sudah mencapai 68.86%, sehingga penduduk miskin harus diprioritaskan untuk penyelesaian masalah.

Pekerjaan

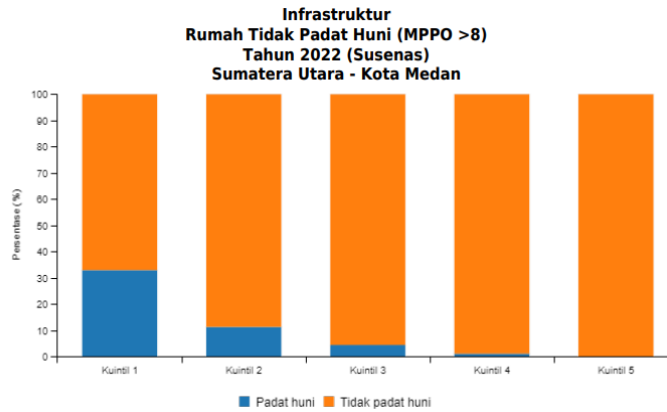


Sumber : Aplikasi Sepakat Web Bappenas (2023)

Indikator Status pekerjaan: formal/informal merupakan indikator dengan capaian paling rendah serta memiliki potensi ketimpangan, dengan capaian sebesar 38.10%. Dari sisi sektor pekerjaan, mayoritas tenaga kerja di Kota Medan bekerja dalam sektor Jasa Masyarakat, Sosial dan Personal. Proporsi

sektor pekerjaan di daerah ini cenderung homogen berdasarkan kelompok pengeluaran.

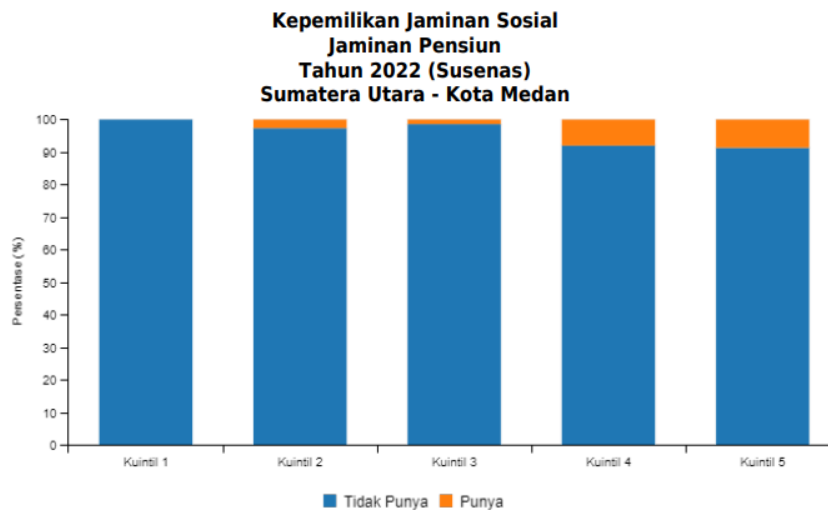
Infrastruktur



Sumber : Aplikasi Sepakat Web Bappenas (2023)

Indikator tidak padat huni merupakan indikator dengan capaian paling rendah di antara indikator-indikator Hunian Sosial, dengan capaian sebesar 8.10%. Lebih dari itu, indikator ini mengalami masalah ketimpangan di mana penduduk 20% termiskin hanya memiliki capaian 66.99% sementara penduduk 20% terkaya sudah mencapai 100.00%, sehingga penduduk miskin harus diprioritaskan untuk penyelesaian masalah.

Kepemilikan Jaminan Sosial



Sumber : Aplikasi Sepakat Web Bappenas (2023)

Indikator kepemilikan pensiun merupakan indikator dengan capaian paling rendah di antara indikator - indikator Perlindungan Sosial, dengan capaian sebesar 4.70%. Lebih dari itu, indikator ini mengalami masalah ketimpangan di mana penduduk 20% termiskin hanya memiliki capaian 0.00% sementara penduduk 20%

terkaya sudah mencapai 8.66%, sehingga penduduk miskin harus diprioritaskan untuk penyelesaian masalah.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini, berdasarkan pembahasan dan analisis diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintah Kota Medan masih banyak ketimpangan dari beberapa sektor variable yang menjadi konsen penelitian ini. Ketimpangan- ketimpangan masih ditemukan . Sebagai Kota Metropolitan tingkat kemiskinan Kota Medan pada tahun 2022 adalah sebesar 8.07%. Nilai ini menunjukkan penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 0.27%. Akan tetapi, hal ini menunjukkan pelambatan penurunan tingkat kemiskinan dibandingkan tahun sebelumnya. Tingkat kemiskinan Kota Medan tahun 2022 dibawah tingkat kemiskinan nasional. Sebagai daerah yang didominasi daerah perkotaan, tingkat kemiskinan Kota Medan masih lebih tinggi dibandingkan tingkat kemiskinan Nasional khusus daerah perkotaan. Dalam penelitian ini penulis memberi saran untuk pemerintah Kota Medan untuk menyusun Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD), melakukan intervensi kebijakan lintas sektor sesuai core problem dari kemiskinan Ekstrem tersebut. Kota Medan selalu berupaya untuk mengatasi permasalahan kemiskinan secara maksimal; Faktanya, kemiskinan masih menjadi masalah yang parah. Penanggulangan kemiskinan memerlukan keterpaduan berbagai kebijakan dan program pembangunan di berbagai sektor. Cara terbaik untuk memerangi kemiskinan adalah dengan mendorong kebijakan yang memperkuat pesan dan posisi ekonomi. Faktor pendorong kemiskinan di Kota Medan adalah pembangunan yang tidak merata (Pratiwi dkk, 2023).

DAFTAR PUSTAKA

- Devani Pratiwi, Sisiliana, Edy Suprayetno, Ulfah Setia Iswara, & Dewi Mahrani Rangkuty. (2023). Studi Kajian Tingkat Kemiskinan di Kota Medan. *Student Research Journal*, 1(4), 142-150.
<https://doi.org/10.55606/srjyappi.v1i4.502>.
<https://medankota.bps.go.id/>
<https://sepakat.bappenas.go.id/pk-analisis>
<https://smeru.or.id/id/research-topics/kemiskinan-ketimpangan>.
<https://tnp2k.go.id/>
- Nisa, K., dkk. (2020). Pengaruh Ketimpangan Pendapatan Terhadap Kemiskinan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2009-2018. *Jurnal Ilmu-ilmu Sosial SOROT*, 15(1), 55-63.

OK. Henry., dkk. (2022). Kajian Faktor Natural dan Kultural Terhadap Penanggulangan Kemiskinan Di Kota Medan (Medan Utara). *Jurnal Potensi*, 2(2), 32-43.